

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA BALAI BESAR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (B2P3KS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Rudi Iswanto

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI, juga melaksanakan serangkaian tugas pokok di bidang penelitian dan pengembangan, selain itu juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. *Good governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif), oleh karena itu disini peran pimpinan sangatlah penting dalam hal mengelola lembaga itu sendiri yang mana keterlibatannya sangatlah dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang dilakukan pimpinan yang ada di lembaga Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang nantinya dapat diketahui harapan dari sebuah pengelolaan itu sendiri sesuai dengan *Good governance*. Inilah basis dari tatanan masyarakat yang diidamkan. Salah satunya yang dilakukan oleh B2P3KS (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berpedoman pada 9 prinsip pokok *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dilakukan oleh B2P3KS. B2P3KS sendiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian yang agar nantinya hasil penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Berkaitan dengan *Good governance* yang bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang dilakukan pimpinan B2P3KS dengan menggunakan prinsip pokok *good governance* tidaklah mudah dalam menjalankannya karena perlu yang namanya keterkaitan dan kerjasama dalam semua aspek dan semua lembaga-lembaga terkait maupun kelompok berkepentingan dalam meningkatkan mutu penelitian agar nantinya dapat digunakan dan bermanfaat sebagai referensi untuk pengambilan keputusan selanjutnya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Jadi tata kelola yang diharapkan adalah tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, disepakati, setara berdayaguna dan berhasil guna dan memiliki visi dan misi yang jelas serta taat kepada hukum.

Kata Kunci: Tata kelola yang mengacu pada 9 prinsip pokok *good governance*

ABSTRACT

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) as one of the technical executing unit environment of the Ministry of Social Affairs, also carry out a series of basic tasks in the field of research and development, while also carrying out the function of service to the community, particularly in areas related to efforts to improve social welfare. Good governance is good can only be created if the two powers mutually supporting responsible citizens, active and conscious, along with a government that is open, responsive, willing to listen, and would involve (inclusive), therefore here the role of leadership is crucial in terms of managing institution itself which keterlibatannya is required.

This study aims to determine the governance committed leaders in institutions Research and Development Social Welfare Services who will find out the expectations of a management itself in accordance with good governance. This is the basis of a society that is desired. One of them carried out by B2P3KS (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial) in Yogyakarta, which has been implementing governance good (good governance) which is guided by nine fundamental principle of good governance that aims to improve the effectiveness and efficiency of the performed by B2P3KS. B2P3KS itself is an institution engaged in research so that later on this research can be used and exploited by others.

Relating to good governance that aims to identify governance leadership's B2P3KS using the fundamental principle of good governance is not easy to run because it needs the name of linkages and cooperation in all aspects and all related institutions and groups interested in improving the quality of research for later can be used and useful as a reference for further decision making in accordance with respective regional policies. So the expected governance is governance that is transparent, accountable, agreed, similar efficient and effective and have a clear vision and mission as well as compliance with the law.

Keywords: governance refers to the fundamental principle of nine good governance

PENDAHULUAN

B2P3KS sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI, juga melaksanakan serangkaian tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan, selain itu juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kepedulian dan peran serta aktif dan keterlibatan langsung dari seorang pimpinan B2P3KS dalam memberikan himbauan kepada masyarakat dan mengkoordinir bawahanya serta dapat memberikan pengertian kepada mereka tentang pentingnya partisipasinya demi menunjang keberhasilan penelitian.

Selain itu pimpinan B2P3KS berperan dalam menegakkan peraturan bersama antara pihak B2P3KS dengan pihak instansi terkait, agar nantinya bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk lebih memahami mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) kita harus memahami pula tentang prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* bisa kita peroleh dari tolak ukur kinerja suatu pemerintahan yang mana baik buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dari semua aspek-aspek yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Tata Kelola yang dilakukan Pimpinan B2P3KS di Daerah Istimewa Yogyakarta

TINJAUAN PUSTAKA

Governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Sj Sumarto, 2004).

Sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Menurut Leach dan Percy-Smith (2001) *government* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan sementara sisa dari kita adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah karena kita semua adalah bagian dari proses *governance* (Sj Sumarto, 2004).

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*shared goal*), (Hemhill dan Coons, 1957). Menurut Jacobs dan Jacques (1990), Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.

Pada intinya kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi.

Redefinisi peran pemerintah menuntut adanya tipe kepemimpinan yang baru. Berbagai literatur tentang perubahan menyebutkan pentingnya *leadership* sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan. Dalam mewujudkan good governance, pimpinan daerah (eksekutif dan legislatif) maupun pimpinan masyarakat (tokoh-tokoh informal, adat) memegang peran yang sangat penting sebagai pendorong atau menghambat perubahan. Kata kunci yang penting dari kepemimpinan yang baru ini adalah *visionary* dan *trustworthy*. Idealnya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan dapat dipercaya (Syahriani dan Syakrani, 2009).

METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk memecahkan masalah yang ingin dikembangkan pada identifikasi masalah yang ada, maka diperlukan metode tertentu sebagai bantuan terselesaikannya masalah yang ada tersebut. Metode penelitian memandu si peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan (Nazir, 1988).

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang pastinya akan dibutuhkan dalam obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh

beberapa aspek yang berintegrasi dan dapat mempengaruhi sebuah arus informasi. Secara langsung melakukan tanya jawab berupa kuesioner untuk memperoleh data dengan pimpinan B2P3KS.

Wawancara penulis dibuat berdasarkan instrument sebagaimana tabel definisi konsepsional dan operasional dimuka.

2. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari berbagai sumber yang diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun media online lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi yang peneliti maksud berasal dari perpustakaan, instansi tempat dilakukannya penelitian maupun dari berbagai literaturnya.

3. Observasi

Pengamatan langsung di lapangan, dimana penyusun langsung melibatkan diri dalam situasi dan kondisi dengan obyek penulisan. Teknisnya dengan mengadakan sebuah penelitian, pencatatan berbagai temuan yang spesifik sebagai penunjang penyusunan penelitian. Selama penelitian nanti penulis akan mencatat dan mengamati B2P3KS.

PEMBAHASAN

A. *Participation* (partisipasi)

1. B2P3KS (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial) selama ini melibatkan bawahan untuk ikut serta dalam persiapan, maupun pelaksanaan tata kelola diantaranya membagi habis pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Penyusunan laporan penelitian sudah terkonsep dengan mekanisme perencanaan yang terukur dan pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana tugas pokok dan fungsinya itu sudah mengacu pada tujuan organisasi pada visi dan misi.

B. *Transparency* (transparansi)

1. Kolaborasi dan koordinasi baik sangatlah dibutuhkan di direktorat terkait, unit operasional sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha.
2. B2P3KS merupakan penelitian yang dilakukan secara terukur oleh sebab itu masetnya pun harus diubah dari mental keinginan ke mental untuk memenuhi permintaan (melayani) agar nantinya hasil penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain.

C. *Responsiveness* (responsive)

1. Mengadakan workshop sebagai tahapan awal yang fungsinya untuk menyerap masukan-masukan dari banyak pihak termasuk mendatangkan orang luar yang handal dibidangnya agar nantinya penelitian yang dihasilkan bisa menjadi penelitian terkini (murni).
2. Meningkatkan jejaring sosial dan fungsi pranata sosial untuk mendukung penelitian di daerah. Sebisa mungkin penelitian yang

dihasilkan dapat bermanfaat, dapat berguna untuk kepentingan langsung.

D. *Consensus orientation* (orientasi kesepakatan)

1. Menyadarkan bahwa kita ini berada di lembaga penelitian jadi harus tau pekerjaan penelitian itu seperti apa, baik kurir, arsiparis, maupun perpustakaan diharuskan mengetahui persis institusi lembaga B2P3KS yang notabnya merupakan lembaga penelitian.
2. Membangun kesadaran untuk bagaimana mereka berkontribusi, memiliki komitmen, memiliki integritas. Siapapun orangnya yang ada di lembaga B2P3KS mereka dituntut untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya sesuai dengan fungsinya untuk mendukung kegiatan positif yang menjadi institusi dari lembaga B2P3KS.

E. *Equite* (kesetaraan)

1. Relasi dan koordinasi pemerintahan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain baik itu dari segi internal maupun eksternal memiliki tujuan saling membantu misalnya di internal dalam hal pengusulan anggaran, menjalin hubungan atau bekerjasama.
2. Harapannya hasil penelitian yang diperoleh dari daerah dapat disosialisasikan ke daerah sebagai dasar pembuatan kebijakan di daerah.

F. *Effectiveness* (efektivitas) dan *efficiency* (efisiensi)

1. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan dikarenakan anggaran penelitian menggunakan dana dari APBN, dan bagaimana dana yang diberikan bisa dilakukan secara maksimal.
2. Ukuran yang dipakai tidak hanya sekedar output tetapi sudah berbasis kinerja, yang berdampak penyisiran anggaran yang

apabila tidak efisien akan dibuang dan publikasipun akan dibuang dan harus tetap disisir dan kegiatan yang boros perlu dievaluasi.

G. *Accountability* (akuntabilitas)

1. Mencintai pekerjaan yaitu dengan cara berusaha sebisa mungkin memahami institusi-institusi kita seperti apa, tanggung jawab kita, kewenangan kita itu seberapa. Jikalau misalnya dalam pelaksanaan tugas ada yang tidak jelas diharapkan langsung dibicarakan atau didiskusikan agar nantinya tercipta kerjasama dan keterbukaan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain.
2. Hal-hal yang melatar belakangi ketidakmampuan seseorang dapat diminimalisir diantaranya seperti kapasitas personalnya seperti masukan-masukan yang kurang dan memang ada beberapa orang yang kapasitasnya itu tidak sampai maka solusinya harus dicarikan orang yang lain yang kapasitasnya dianggap sampai.

H. *Strategic vision* (visi strategis)

1. Menganalisa sesuai dengan visi dan misi yang ada di B2P3KS yaitu dengan cara membuat terobosan-terobosan dan memenuhi kebutuhan misalnya pengevaluasian sebuah program dan B2P3KS yang notabnya lembaga legal dalam soal itu yang merupakan hasil evaluative.
2. Membangun relasi yang baik dengan peneliti-peneliti sehingga mereka menempati skedul-skedul yang kita buat agar kinerjanya dapat tercapai

I. *Rule of law* (penegakan 9iker)

Manajer-manajer terkadang terlihat lebih keras dalam rangka merubah mindset, merubah perilaku, pola 9iker, pola tindak menjadi lebih produktif agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian pada Bab III sebelumnya tentang tata kelola pimpinan B2P3KS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada 9 prinsip *good governance*, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditulis oleh penulis. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diantaranya adalah:

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial selama ini melibatkan bawahan untuk ikut serta dalam persiapan, maupun pelaksanaan tata kelola diantaranya membagi habis pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan laporan penelitian sudah terkonsep dengan mekanisme perencanaan yang terukur dan pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana tugas pokok dan fungsinya itu sudah mengacu pada tujuan organisasi pada visi dan misi. B2P3KS merupakan penelitian yang dilakukan secara terukur oleh sebab itu mansetnya pun harus diubah dari mental keinginan ke mental untuk memenuhi permintaan (melayani) agar nantinya hasil penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mengadakan workshop sebagai tahapan awal yang fungsinya untuk menyerap masukan-masukan dari banyak pihak termasuk mendatangkan orang luar yang handal dibidangnya agar nantinya penelitian yang dihasilkan bisa menjadi penelitian terkini (murni).

Relasi dan koordinasi pemerintahan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain baik itu dari segi internal maupun eksternal memiliki tujuan saling membantu misalnya di internal dalam hal pengusulan anggaran, menjalin hubungan atau bekerjasama. Harapannya hasil penelitian yang diperoleh dari daerah dapat disosialisasikan ke daerah sebagai dasar pembuatan kebijakan di daerah. Oleh sebab itulah manajer-manajer terkadang terlihat lebih keras dalam rangka merubah menset,

merubah perilaku, pola pikir, pola tindak menjadi lebih produktif agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tata kelola yang diharapkan adalah tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, disepakati, setara berdayaguna dan berhasilguna memiliki visi dan misi jelas serta taat kepada hukum.

Saran

Pada lembaga B2P3KS diharapkan meningkatkan kualitas SDM yang ada seperti penyesuaian dan peningkatan jenjang pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun diklat kepada pegawai sehingga kinerja intansi semakin baik. Selanjutnya menambah fasilitas yang ada seperti mengusahakan tersedianya buku-buku literatur yang lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan teoritik sebagai bekal dalam kegiatan penelitian, serta mengoptimalkan fungsi internet sebagai sarana untuk mengembangkan hasil kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azyumardi, Azra. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenada Media. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian cetakan ke-3*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Citra Karsa Mandiri. Jogjakarta.
- Saefulloh, Aep. 2011. *Modul Pendidikan Kewarganegaraan*. Batik Press. Bandung.
- Sumarto, Sj Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Budiman Pagarnegara. Jakarta.
- Syakrani dan Syahriani. 2009. *Good Governance*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ubaedillah. A dan Abdul Rozak, 2003. *Pancasila Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi revisi*. Prenada Media Gruf. Jakarta.
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yukl. Gary dan Udaya, Yusuf. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Prenhallindo. Jakarta.
- Buku Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) 2015
- Regulasi Pemerintah :
Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003